

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DI DESA KULUREJO
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI**



¹ Mufid Fathul Mas'ud, Maesaroh ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: mufidfm09@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo melalui dana desa masih belum maksimal, hal ini dikarenakan persentase penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya mencapai 7% dari himbauan 30%, kemudian terdapat 2 subbidang yang belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dengan pendekatan tahap pemberdayaan masyarakat yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa belum maksimal dikarenakan upaya penyadaran yang tidak optimal dengan warga yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur, kegiatan yang tidak berkelanjutan dalam tahap pengkapasitasan, dan kemampuan IT masyarakat yang masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya pengoperasian teknologi, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi yang masih kurang intens. Faktor yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sendiri diantaranya adalah mulai diterapkannya teknologi dalam kegiatan, kepemimpinan yang baik, komunikasi yang mengedepankan budaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang baik. Saran yang dapat diberikan adalah: penambahan intensitas pelatihan IT bagi masyarakat dan perangkat desa, penambahan jumlah petugas desa untuk mendampingi masyarakat, dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa

**COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH VILLAGE FUNDS IN KULUREJO
VILLAGE, NGUNTORONADI DISTRICT, WONOGIRI DISTRICT**

¹ Mufid Fathul Mas'ud, Maesaroh ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: mufidfm09@gmail.com

Abstract

Community empowerment in Kulurejo Village through village funds is still not maximal, this is because the percentage of village funds used for community empowerment activities only reaches 7% of the 30% appeal, then there are 2 subfields that have not been implemented to the maximum. This research aims to describe and analyze the implementation of community empowerment through village funds with a community empowerment level approach that is the level of awareness, capacity, and utilization. This research is qualitative research. The results showed that the implementation of community empowerment through village funds has not been maximized due to the non-optimal awareness efforts with citizens who still care about infrastructure development, unsustainable activities in the capacity stage, and limited it capabilities of the community. This is influenced by the limited operation of technology, the limited amount of human resources that accompany community empowerment activities and communication that is still less intense. Factors that support community empowerment activities through village funds themselves include the start of technology in activities, good leadership, communication that promotes community culture, and good community participation. Suggestions that can be given are: increased intensity of IT training for the community and village devices, an increase in the number of village officers to accompany the community, and improved communication with the community.

Keywords: *Community Empowerment, Village Fund*

A. PENDAHULUAN

Data dari BPS pada tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Tengah mencapai sebanyak 34,257,900 jiwa atau sekitar 13,1% dari penduduk Indonesia atau terbanyak ketiga setelah Jawa barat yang memiliki 48,037,600 penduduk dan Jawa Timur yang memiliki 39,29,000 jumlah penduduk. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang terbanyak jumlah penduduk di Indonesia. Dalam hal kemiskinan, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan penyumbang penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Wonogiri yang merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, di lain sisi dari sekian kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri termasuk kabupaten yang mendapatkan anugerah indeks daya saing daerah tingkat Provinsi dengan predikat juara pertama pada tahun 2019 se Jawa Tengah, hal ini menegaskan bahwa Wonogiri termasuk kabupaten yang berprestasi dalam hal inovasi maupun IPTEK, di lain sisi dalam hal kemiskinan Kabupaten Wonogiri juga mengalami penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dari tabel jumlah dan peresentase penduduk miskin se Kabupaten Wonogiri berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2018

Tahun	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)
2016	13.12 %
2017	12.90 %
2018	10.75 %

Sumber : olahan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 2018

Data jumlah penduduk dan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2016 hingga Tahun 2018 telah mengalami penurunan. Tahun 2016 persentase kemiskinan di Kabupaten Wonogiri mencapai (13.12%), kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase kemiskinan mencapai (12.90%). Tahun 2018 terjadi penurunan kemiskinan kembali sebesar (10,75%). Penurunan angka kemiskinan secara signifikan tersebut dapat mengindikasikan bahwa program pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri telah berhasil dilaksanakan.

Kabupaten Wonogiri, dalam rangka pelaksanaan pembangunan, seperti halnya daerah lain di Indonesia, diberi dorongan oleh pemerintah dalam bentuk Dana Desa yang diberikan kepada masing masing desa. Penggunaan Dana Desa tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai bidang kegiatanm antara lain kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Salah satu kegunaan dari dana desa yang saat ini gencar ditekankan adalah penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang berguna dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa, agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran diberikannya Dana Desa khususnya berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut Anwas (Dr. Oos M. anwas, 2013) dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Desa Kulurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Nguntoronadi yang menerima dana desa cukup besar. Namun, data hasil pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo menunjukkan bahwa hanya ada 5 kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh pihak pemerintah desa Kulurejo, yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa, Penyelenggaraan Posyandu dan Posbindu, Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB), Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar serta Penyelenggaraan Pos kesehatan desa. Hanya terdapat dua sub kegiatan saja yang dicapai pemerintah desa dan hal tersebut diduga karena dalam proses pemberdayaan masyarakat masih terdapat beberapa hal yang kurang optimal dimana menurut Wilson (dalam Nyoman S., 2005:130) menyatakan ada 4 tahap proses pemberdayaan yaitu tahap *awakening, understanding, dan harnessing* yang apabila keempatnya dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

yang tidak maksimal dapat mempengaruhi penyusunan kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa karena ketika masyarakat tidak diberdayakan dengan baik maka, pemerintah desa tidak akan dapat memahami dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat dan kegiatan yang mendukung apa yang dibutuhkan warga tersebut. Keseluruhan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo lebih lanjut, hanya menghabiskan dana sebesar Rp 60.425.750 atau 7% dari total dana yang diterima, dan hal ini sangat sedikit dibandingkan dengan persentase yang seharusnya dilaksanakan dan dihimbau oleh Kemendagri dimana dana untuk Pemberdayaan masyarakat seharusnya sebesar 30% (Okezonews.com,2018). Desa Kulurejo juga merupakan desa yang mempunyai lahan pertanian cukup luas, hal ini diketahui dari luas lahan persawahan yang mencapai 1.488.00 ha, sedangkan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu seharusnya dengan potensi yang dimiliki Desa Kulurejo, pemerintah desa harusnya lebih mampu memberdayakan masyarakat terutama terkait potensi di sektor pertanian, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo yang masih kurang mendapat perhatian dengan masih sedikitnya persentase dana desa yang diperuntukan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan masih adanya kegiatan pemberdayaan yang belum mencapai 100% pada realisasinya menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo sebenarnya dan

faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a) Manajemen Publik

Laurence Lynn dalam Wijaya (2014 : 2) mempertimbangkan tiga kemungkinan tentang gambaran manajemen publik, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*) dan profesi (*profession*). Secara umum, apa yang dimaksud Lynn mengenai manajemen publik sebagai seni adalah aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para praktisi tidak dapat dipelajari dengan cara “dihitung” artinya manajemen publik merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dimana beroperasi. Unsur manajemen kini berupa satu bagian pokok dalam pengelolaan organisasi yang mana organisasi pada ranah swasta ataupun ranah publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen publik berangkat dari manajemen sektor swasta yang tidak menjadikan arah tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi seperti sektor swasta.

b) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat Mas'ood (Mardikanto, 2017: 26). Keberdayaan masyarakat oleh

Sumodiningrat dalam Totok Mardikanto. (2017: 26) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat selanjutnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sugiani dalam prosiding seminar ilmiah nasional Kesehatan mengemukakan temuannya terkait factor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

1. Tingkat pendidikan
2. Akses Informasi
3. Kepemimpinan

Tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang diungkapkan oleh Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:1001) sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran
2. Tahap Pengkapisitan
3. Tahap Pendayagunaan

c) Dana Desa

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dijelaskan Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini, adalah model penelitian pendekatan kualitatif, menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010: 8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, penentuan beberapa informan dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Data penelitian kualitatif merupakan data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol dengan menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan serta kejadian tertentu yang dijabarkan dalam catatan lapangan (transkrip). Data terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Desa Kulurejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Nguntoronadi yang mendapatkan Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar di urutan ketiga berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri No 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 dengan total dana desa yang diterima adalah Rp 445.973.000,00. Jumlah dana desa tersebut tentulah bukan jumlah yang sedikit, oleh karena itu seharusnya perangkat Desa Kulurejo seharusnya dapat mengelola dana tersebut dengan baik agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat Desa Kulurejo. Penetapan besaran dana desa bagi Desa Kulurejo tersebut didasarkan pada kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan yang ada dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Wonogiri No 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018. Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Kulurejo sendiri dari hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tahap Penyelesaian dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa

Tahap penyelesaian menurut Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:1001) merupakan sebuah tahap yang paling awal dimana pada tahap ini pihak yang memberdayakan memberikan penyelesaian kepada masyarakat untuk memahami potensi yang

dimiliki melalui sosialisasi atau penyuluhan. Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo diawali dengan pengkajian kondisi lapangan oleh pendamping desa dan aparat desa. Tahap penyadaran selanjutnya dilakukan melalui musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa). Pada tahap awal, pihak desa sudah berusaha untuk menjelaskan terkait regulasi penggunaan dana desa pada masyarakat Desa Kulurejo pada awal kegiatan perencanaan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi pada masyarakat terkait bagaimana seharusnya dana desa dikelola, dalam pemberdayaan masyarakat upaya ini dikenal dengan tahap *awakening* atau penyadaran yang menurut Wilson dalam (Sumaryadi,2005:130) merupakan tahap awal dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dan sejauh ini sudah dilakukan dengan baik.

Namun, pada saat proses musyawarah, masyarakat justru tetap memberikan usul yang lebih banyak mengarah pada pembangunan dibandingkan dengan usulan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat lebih lanjut, berkaitan erat dengan proses memotivasi masyarakat yang biasanya dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan biasanya dilaksanakan disela-sela pertemuan atau perkumpulan warga desa. Kegiatan sosialisasi tersebut berdasarkan hasil analisis memberikan dampak yang cukup baik dimana warga desa mulai memahami perihal dana desa dan penggunaannya seharusnya. Tidak hanya itu, warga desa juga mulai mengetahui pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi mereka,

dan disini warga desa mulai menyadari bahwa sebenarnya mereka lebih membutuhkan kegiatan pelatihan ataupun kegiatan untuk menambah keterampilan yang dimiliki.

2. Tahap Pengkapasitasan dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa

tahap pengkapasitasan, tahap ini menurut Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:1001) merupakan tahap dimana masyarakat diberdayakan dengan peningkatan kemampuan. penggunaan dana desa di Desa Kulurejo. , selama ini sudah berusaha untuk memberdayakan sumberdaya yang dimiliki mulai dari Sumber daya manusia yang dimiliki yakni perangkat desa dan pendamping desa dengan cara memberikan peran masing-masing pada mereka untuk menjalankan tugas kaitannya dengan masyarakat dan masyarakat sendiri yang juga diberi tugas untuk melaksanakan dan memastikan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan dari segi teknologi dan peralatan, pihak pemerintah desa sudah berupaya untuk menggunakan teknologi yang ada kaitannya dengan administrasi yang dilaksanakan dengan menggunakan SISKEUDES serta penggunaan smartphone sebagai media komunikasi dan pilihan cara berkoordinasi ketika sesuatu tersebut sangat penting. Pelaksanaan tahap pengkapasitasan lebih lanjut, meskipun prioritas penggunaan dana desa lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur namun, masih terdapat dana untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini ditekankan pada kegiatan intervensi dan pelatihan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam

bentuk kampung KB dan beberapa pelatihan termasuk didalamnya adalah pelatihan pembuatan pupuk. Hal tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan tahap pemberdayaan masyarakat tahap pendayagunaan, dimana pemerintah desa dan warga desa bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan. Akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tidak berkelanjutan

3. Tahap Pendayagunaan dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa

Tahap Pendayagunaan menurut Randy R. Wrihatmolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:1001) merupakan tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya. Tahap pendayagunaan, dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui dana desadi Desa Kulurejo, dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dimulai dari sumber daya manusia termasuk didalamnya perangkat desa, pendamping desa, dan masyarakat diajak untuk ikut mengawasi pelaksanaan yang ada. Kemudian pendayagunaan berkaitan dengan teknologi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pembuatan SPJ untuk mempermudah dan meminimalisir penyelewengan yang terjadi. Karena melalui system SISKEUDES, seluruh kegiatan mulai dari penganggaran, dan pelaksanaan data-datanya diinput sesuai kode rekening,

sehingga tidak akan ada pengadaan diluar kode-kode rekening.

Pelaksanaan tahap ini juga telah melibatkan masyarakat, Masyarakat diberi hak untuk mengetahui kegiatan yang diselenggarakan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh pihak desa. Kemudian, masyarakat juga diberi hak untuk melaporkan hal-hal yang mengarah pada penyelewengan dana pada pihak pendamping desa, BPD, ataupun pihak Kecamatan untuk ditindaklanjuti, disamping itu, masyarakat dilibatkan langsung dalam kegiatan yang berlangsung sehingga masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan program secara langsung.

Pengelolaan dana desa di Desa Kulurejo berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor . Penelitian ini berusaha untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Kulurejo dengan melihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi asset bagi organisasi dan perlu diperhatikan agar pengelolaan dapat berjalan lancar (Susanto dalam Tangkilisa, 2005:189). Faktor sumber daya manusia tidak dapat lepas dari partisipasi masyarakat yang merupakan hal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang baik juga seharusnya dapat melibatkan masyarakat didalamnya baik dari tahap kesadaran hingga pendayagunaan, dengan begitu penyelewengan dana desa dan konflik dengan masyarakat desa terkait keuangan desa dapat diminimalisir sekaligus memaksimalkan proses

pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat yang ada. Penggunaan dana desa di Desa Kulurejo dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat sejauh ini sudah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya. Masyarakat Desa Kulurejo juga memiliki kesadaran untuk ikut dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan dimana masyarakat Desa Kulurejo aktif memberikan usulan dan pendapat, kemudian pada proses pengorganisasian masyarakat mudah untuk dikoordinir, turut serta dalam setiap program secara sukarela pada tahap pengarahan contohnya adalah ikut bergotong royong dan dengan kesadaran masing-masing menyediakan makanan secara swadaya untuk mendukung kelancaran kegiatan dan aktif mengawasi kegiatan dan memberikan kritik atau laporan terkait pelaksanaan yang sekiranya tidak sesuai. Meskipun demikian masih terdapat beberapa warga yang sulit untuk ikut berpartisipasi. Kemudian dari segi penggunaan teknologi, diterapkan dalam proses pengadministrasian dari dana desa sendiri melalui SISKEUDES dan telah dijelaskan dengan baik oleh Bendahara Desa, meskipun terkadang masih terdapat kendala keterbatasan kemampuan pengoperasian aplikasi tersebut.

2. Faktor Disposisi

Seorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang memiliki rencana, mampu menghadapi tantangan, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain

Kepemimpinan dari Kepala Desa Kulurejo selama ini sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan Kepala Desa Kulurejo telah menjalankan perannya dalam mengarahkan dan memimpin perangkat desa dan masyarakat desa. Dalam

kepemimpinannya, Kepala Desa Kulurejo dikenal memiliki sikap yang ramah dan menjaga komunikasi dengan siapa saja dengan baik. Kepala Desa Kulurejo juga senantiasa mengawasi perangkat desa serta membantu mereka apabila terdapat kesulitan. Namun, kepemimpinan Kepala Desa Kulurejo yang dinilai sudah baik kenyataannya belum dapat sepenuhnya menggerakkan masyarakat desa untuk memprioritaskan pemberdayaan masyarakat pada saat kegiatan musrenbangdes sebagai usulan dari mereka

3. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang telah dilakukan dengan masyarakat dan perangkat desa serta upaya dalam menggerakkan seluruh pihak dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kulurejo dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kondisi dari masing-masing pihak. Akan tetapi Kepala Desa Kulurejo masih kurang intens dalam membahas perihal pentingnya pemberdayaan masyarakat dan alasan mengapa kegiatan tersebut harus menjadi prioritas dalam usulan musrenbangdes kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih saja berfikir bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan dana desa. Komunikasi juga berkaitan dengan budaya masyarakat. Desa Kulurejo dalam penggunaan dana desa nya untuk pemberdayaan masyarakat sejauh ini masih melestarikan dan menjaga budaya yang ada di desa tersebut. Meskipun fokus desa adalah pembangunan infrastruktur namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek budaya dan menerapkannya dalam setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Pelaksananya penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 7% dari 30% seharusnya. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang belum optimal dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilalui berikut:

1. **Tahap penyadaran** yang belum maksimal hal ini dikarenakan meskipun kegiatan sosialisasi dan pengertian terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat hingga himbauan untuk menjadikannya kegiatan prioritas telah di sosialisasikan pada saat kegiatan musrenbangdes, warga masih berfikir bahwa pembangunan infrastruktur jauh lebih penting daripada pemberdayaan masyarakat.
2. **Tahap Pengkapasitasan**, tahap ini telah dilaksanakan sebaik mungkin dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak disiapkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. **Tahap Pendayagunaan**, pada tahap ini masyarakat telah dilibatkan dengan baik, tahap ini juga berkaitan dengan perihal penggunaan IT dalam urusan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan IT yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan masih terbatas karena belum semuanya dapat melakukan hal tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Kulurejo adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- a. Adanya penggunaan teknologi dalam proses komunikasi dan administrasi sehingga memudahkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Kulurejo
- b. Kepemimpinan Kepala Desa Kulurejo yang berjalan baik, karena pemimpin yang komunikatif dan aktif
- c. Komunikasi yang terjalin dengan baik dengan mengedepankan Budaya masyarakat yang masih terjaga terutama budaya gotong royong dan budaya "*ngewongke*" dan "*handarbeni*" sehingga kerjasama yang terjalin dapat terlaksana dengan baik
- d. Partisipasi masyarakat yang baik, hal ini karena adanya kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat sehingga komunikasi yang terjalin berjalan dengan baik dan masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa

2. Faktor Penghambat

- a. Terdapat keterbatasan pengoperasian teknologi oleh beberapa pihak dalam hal komunikasi

- b. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dari pihak pemerintah desa yang mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Komunikasi yang terjalin masih kurang intens sehingga belum mampu menggerakkan masyarakat untuk menjadikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas pada kegiatan musrenbangdes

b) Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini kemudian menjadi bahan pertimbangan penulis untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan intensitas pelatihan bagi masyarakat dan perangkat desa dalam penggunaan teknologi, misalnya dalam hal pendayagunaan website, pembuatan konten youtube, komputerisasi dan pemanfaatan media sosial seperti Instagram demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat khususnya memiliki peningkatan kemampuan dalam merespon dan mengaplikasikan teknologi.
2. Penambahan petugas desa, khususnya yang berlatar belakang Pendidikan di bidang teknologi informatika, sistem informasi, bidang sosiatri, bidang manajemen dan kebijakan publik.

3. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pendamping desa dan RT RW dengan cara melakukan follow up secara langsung (dengan cara turun ke setiap dusun, RT, RW) untuk mengetahui langsung permasalahan-permasalahan yang timbul, potensi-potensi yang ada di setiap dusun yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan program pemberdayaan masyarakat dan dengan cara tidak langsung yakni mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti (WhatsApp, Instagram, Line) untuk menyebarkan informasi secara edukatif dengan menanamkan pengetahuan, pola pikir yang memberi kesadaran dan menanamkan pemikiran pada masyarakat bahwa pentingnya program pemberdayaan masyarakat perlu diprioritaskan dalam penggunaan dana desa dan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja.

F. REFERENSI

Buku :

Hakim, Lukman EM.2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar- Ruzz media.

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Herdiansyah, Heris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardikanto dan Poerwoko, Totok. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Tjetjep R.R, penerjemah. Jakarta: UI-Press. Terjemahan dari Qualitative Data Analysis.
- Riant Nugroho, Randy W. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Alex Media Komputindo
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Wijaya, A.F., dan Oscar Radyan Dinar. 2014. *Manajemen Publik : Teori dan Praktek*. Malang: UB Press.
- Hulu, Yamulia ,R Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial UNIMET* Vol 10, No 1 (2018)
- Letik, Andreas. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Vol. 9, No 1, (2019)
- Prasetyaningtyas, Feni, Susi. 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalm Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Of Public Policy and Management* Vol 7 No 1 Tahun (2018)
- Fadlillah, Pipit Anissatul, Kushandajani. Anlisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan UNDIP* Vol 8 No 4 (2017)
- Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Dkk. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas*
- Jurnal :

- Ekonomi UNIAT, Vol 4 No 1 (2019)
- Feni Yudianti Prasetyaningtyas, Susi Sulandari. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol 7 No 1 (2018)
- Suryahadi, Asep, Ridho, A.I. Cards for the Poor and Funds for Villages (Jokowi's Initiatives to Reduce Poverty and Inequality). *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol 35, No 2 (2018)
- Sukmawati, Fitri, Haizam, Mohd, Saudi, Mohd. Effects of Utilization of Village Funds on Community Empowerment in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 6, Issue 5 (2019)
- Tjilen, Alexander Phuck, Samel, W.R, Fenty, Y.M. Local Community Empowerment Implementation of Village Fund Program in District Naukenjerai of Merauke Regency. *International Journal of Mechanical Engineering and technology (IJMET)*, Vol 10, Issue 01 (2019)
- Mujtahid, I.M, Titi Darmi. Reinforcement The Capacity Of Village Fund Management To Improve The Economy Of Local Communities (Indonesia Example). *International Journal of scientific and Technology Research*, Vol 8, Issue 10 (2019)
- Azlina, Nur, Amir Hasan, Desmiyawati, Iskandar Muda. The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau). *International Journal of Economy Research*, Vol 14, No 12 (2017)
- Peraturan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018
- Lainnya:
<https://news.okezone.com/read/2018/02/20/340/1861954/mendagri-30-persen-dana-desa-untuk-berdayakan-masyarakat> (diakses pada tanggal 15 Juli 2020)